

ABSTRAK

Muhammad Syddik Ramjani, 1163030052: *Analisis Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Pasal 4 Dan 23 Terhadap Status Kewarganegaraan Mantan Milisi Isis Asal Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyyah*. Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah isu terorisme yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian seluruh dunia, yang mana kehadiran dari gerakan separatis ini mengancam kestabilan dan keamanan seluruh dunia. Salah satunya dengan munculnya gerakan militerisme *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) sebagai kelompok terorisme kontemporer yang tentunya dipengaruhi oleh perkembangan sosial.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui batasan, kriteria, kedudukan, dan status kewarganegaraan mantan milisi ISIS asal Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan bagaimana siyasah dusturiyyah meninjau kedudukan hukum mantan milisi ISIS asal Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang akan menghasilkan data deskriptif yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian studi kepustakaan sehingga dalam penyelesaiannya harus dilakukan berupa pengumpulan data dengan teori-teori, dalil, dan penelusuran berbagai literatur yang bersangkutan dengan tema yang diangkat dalam penelitian.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara, teori kebijakan publi, teori kepastian hukum sebagai pisau analisis yang digunakan untuk membedah mengenai status kewarganegaraan mantan milisi ISIS asal Indonesia. Dalam kerangka pemikiran penelitian ini berisikan tentang penjelasan terhadap tinjauan umum tentang kewarganegaraan, tinjauan umum tentang teori perundang-undangan di Indonesia, dan tinjauan umum tentang teori siyasah dusturiyyah yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan status kewarganegaraan mantan milisi ISIS asal Indonesia harus melalui proses administratif yang dilakukan di pengadilan. Walaupun di dalam UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak ditulis secara langsung bahwa pencabutan kewarganegaraan disebabkan karena seseorang masuk ke dalam organisasi teroris, tetapi ISIS dinyatakan sebagai organisasi yang memberikan dampak besar terhadap dunia dan mengancam kestabilan negara. Maka mantan milisi ISIS asal Indonesia harus diterima kembali di negara dengan melalui proses pengadilan. Hal ini sejalan dengan teori siyasah dusturiyyah kekuasaan adalah amanah, bahwa mantan milisi ISIS asal Indonesia berhak mendapatkan perlindungan, pengakuan, dan peradilan dari pemerintah Indonesia

Kata Kunci: *ISIS, Kewarganegaraan, Undang-Undang, Siyasah Dusturiyyah.*



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG